

ANEKSASI CRIMEA DALAM PERSPEKTIF *GROUP OF SEVEN* DAN HUKUM INTERNASIONAL

Bimo Satryo W.

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: bimo.satryo.2012@fisipol.umy.ac.id / satryo.bimo.wibowo@gmail.com

Abstract

Ukraine crisis had begun in November 2013 followed by Russia's annexation over Crimea. It had caused internationally sanctioned upon Russia. The action has been claimed as a violation towards International Law which related to territory and sovereignty. Group of Eight (G8), as one of organization in which Russia had registered in, also taking action with suspending Russia's membership. This paper will explain more the reason behind G7's policy which suspends Russia's policy under the role of G7 as international organization and international law perspective.

Keywords

Rusia, Crimea, Ukraina, *Group of Seven*, *Group of Eight*, Hukum Internasional, Organisasi Internasional

Pendahuluan

Sebagai respon terhadap kebijakan Rusia yang memasukkan wilayah Crimea sebagai wilayah bagian dari Rusia pada tanggal 18 Maret 2014, Amerika Serikat, Uni Eropa serta negara dunia lainnya mengambil langkah strategis untuk menyudahi intervensi Rusia dalam hal politik dan militer di wilayah Crimea dan Ukraina, serta mengembalikan status wilayah Crimea kepada Ukraina. Langkah strategis tersebut adalah memberikan sanksi kepada Vladimir Putin dan beberapa pejabat berpengaruh Rusia lainnya, berupa pembekuan segala aset ekonomi di seluruh dunia, serta pelarangan kepengurusan visa sebagai kepala pemerintahan dan pejabat Rusia. Selain itu, sanksi ekonomi berupa penghentian aktivitas perdagangan dengan Rusia yang mencakup hal-hal strategis seperti perdagangan minyak dan gas alam, serta beberapa investasi yang memiliki nilai strategis juga dijatuhkan.

Komunitas G8 pun tidak ingin tinggal diam. Sebagai negara individu berbagai macam sanksi dan langkah politik telah dilakukan oleh para negara anggota. Namun sebagai sebuah komunitas internasional, G8 memberikan respon berupa pemboikotan pertemuan G8 yang semula akan diadakan di kota Sochi, Rusia. Pertemuan tersebut lantas dialihkan dengan pertemuan G7 di Markas Besar NATO, Brussel, Belgia, serta penundaan keanggotaan Rusia dalam komunitas G8. Menteri luar negeri Amerika Serikat mengatakan,

“He is not going to have a Sochi G8, he may not even remain in the G8 if this continues” (Swain, 2014).

Rusia sendiri memberikan respon dengan mengatakan bahwa penundaan status keanggotaan Rusia di G8 tidak akan memberikan efek apapun kepada perekonomian Rusia yang mayoritas disumbang oleh sektor alam seperti gas alam dan minyak bumi, serta hasil alam lainnya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, bahwa G8 sebagai sebuah komunitas ekonomi internasional bukanlah komunitas internasional resmi. Sehingga segala kebijakan yang dikeluarkannya tidak akan mengikat atau memberikan perubahan apapun terhadap politik dan perekonomian Rusia (Official Website of Russia's G8 Presidency, 2014).

Selain itu, Rusia justru menantang sanksi yang diberikan tersebut dengan melakukan boikot produk dari negara-negara yang memberikan sanksi kepadanya, seperti produk-produk dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, serta sekutu lainnya. Hal ini untuk membuktikan bahwa Rusia tak akan gentar dengan berbagai bentuk ancaman serta perlakuan internasional kepadanya.

Perspektif *Group of Seven (G7)*

Dalam teori yang dikemukakan oleh Florian Znaniecki mengatakan bahwa dalam konsep peran sosial dan lingkaran sosial, peran sosial tak hanya berlaku ke dalam seseorang atau individu, namun juga termasuk kelompok-kelompok yang terdiri dari individu-individu. Karena pada dasarnya di dalam sebuah lingkaran sosial tersebut terdapat sebuah hubungan

aksi-reaksi antara status dan peran yang diemban oleh masing-masing individu yang terlibat. Status dan peran tersebut terikat oleh norma dan nilai yang terdapat dalam lingkaran sosial tersebut (*BeeHive Digital Concept Cochin for Mahatma Gandhi University Kottayam n.d., 90*).

Sebagai salah satu organisasi internasional yang bergerak di bidang ekonomi dan kesejahteraan manusia, G7 turut serta dalam mengutuk aksi aneksasi Crimea oleh Rusia. G7 yang terdiri dari tujuh negara industri terkuat dunia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, kebebasan, perdamaian dan keamanan, serta kemakmuran bersama. Nilai-nilai tersebut telah tercermin dalam setiap kebijakan serta kesepakatan yang dikeluarkan oleh G7, bahkan selalu ditegaskan di setiap deklarasi yang dikeluarkan setelah pertemuan rutin diadakan.

“We, the Leaders of Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, the United States, the President of the European Council and the President of the European Commission, met in Brussels on 4 and 5 June 2014. This Group came together because of shared beliefs and shared responsibilities. We are profoundly committed to the values of freedom and democracy, and their universality and to fostering peace and security. We believe in open economies, open societies and open governments, including respect for human rights and the rule of law, as the basis for lasting growth and stability. For nearly forty years, we have shown through our actions that collective will can be a powerful catalyst for progress. Our efforts to address major global challenges have also been guided by a commitment to transparency, accountability and partnership with other concerned members of the international community. We remain bound together as a group by these values and this vision. Guided by these shared values and principles, we will continue to work together to meet the challenges of our times. We thank the European Union for hosting this Summit and welcome Germany’s Presidency.” (Government of Canada, 2014)

Dengan dikeluarkannya kebijakan aneksasi Crimea tersebut G7 tidak hanya sebatas mengutuk aksi tersebut melainkan melakukan boikot terhadap pertemuan G8 yang seharusnya dilaksanakan di Kota Sochi Rusia tanggal 4 sampai 5 Juni 2014, bahkan G7 mengeluarkan kebijakan penundaan keanggotaan Rusia dalam G8. Berikut ini adalah beberapa statement resmi yang dikeluarkan oleh beberapa pemimpin negara dalam pidatonya setelah melaksanakan pertemuan rutin G7 yang diadakan di Brussel Belgia, tanggal 4 sampai 5 Juni 2014. Selain itu terdapat juga petikan pernyataan yang diambil dari dokumen resmi G7, maupun *press release* dari beberapa institusi negara anggota G7:

1. Petikan pernyataan resmi G7 dalam “The Hague Declaration” se usai pertemuan mendadak yang diadakan oleh G7 sebagai respon terhadap kebijakan aneksasi Crimea oleh Rusia tanggal 24 Maret 2014 (*Group of Seven (G7), 2014*):

“1. We, the leaders of Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, the United States, the President of the European Council and the President of the European Commission met in The Hague to reaffirm our support for Ukraine’s sovereignty, territorial integrity and independence.

2. We remind Russia of its international obligations, and its responsibilities including those for the world economy. Russia has a clear choice to make. Diplomatic avenues to de-escalate the situation remain open, and we encourage the Russian Government to take them. Russia must respect Ukraine’s territorial integrity and sovereignty, begin discussions with the Government of Ukraine, and avail itself of offers of international mediation and monitoring to address any legitimate concerns.

3. The Russian Federation’s support for the Organization for Security and Co-operation in Europe’s Special Monitoring Mission to Ukraine is a step in the right direction. We look forward to the mission’s early deployment, in order to facilitate the dialogue on the ground, reduce tensions and promote normalization of the situation, and we call on all parties to ensure that Special Monitoring Mission members have safe and secure access throughout Ukraine to fulfill their mandate.

4. This Group came together because of shared beliefs and shared responsibilities. Russia’s actions in recent weeks are not consistent with them. Under these circumstances, we will not participate in the planned Sochi Summit. We will suspend our participation in the G-8 until Russia changes course and the environment comes back to where the G-8 is able to have a meaningful discussion and will meet again in G-7 format at the same time as planned, in June 2014, in Brussels, to discuss the broad agenda we have together. We have also advised our Foreign Ministers not to attend the April meeting in Moscow. In addition, we have decided that G-7 Energy Ministers will meet to discuss ways to strengthen our collective energy security.

5. At the same time, we stand firm in our support for the people of Ukraine who seek to restore unity, democracy, political stability, and economic prosperity to their country. We commend the Ukrainian government’s ambitious reform agenda and will support its implementation as Ukraine seeks to start a new chapter in its history, grounded on a broad-based constitutional reform, free and fair presidential elections in May, promotion of human rights and respect of national minorities.

6. The International Monetary Fund has a central role leading the international effort to support Ukrainian reform, lessening Ukraine’s economic vulnerabilities, and better integrating the country as a market economy in the multilateral system. We strongly support the IMF’s work with the Ukrainian authorities and urge them to reach a rapid conclusion. IMF support will be critical in unlocking additional assistance from the World Bank, other international financial institutions, the EU, and bilateral sources. We remain united in our commitment to provide strong financial backing to Ukraine, to co-ordinate our technical assistance, and to provide assistance in other areas, including measures to enhance trade and strengthen energy security.”

2. Petikan pernyataan resmi Komisi Eropa (European Commission) dalam press release yang dikeluarkan tanggal 3 Juni 2014 (*European Commission, 2014*):

“At their meeting in The Hague on 24 March, the G7 at leaders' level (Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, the President of the European Council and the President of the European Commission decided not to participate in the planned G8 Summit in Sochi (Russia) as a reaction to the Russian Federation's violation of Ukraine's sovereignty and territorial integrity. Instead, they decided to meet in Brussels in the G7 format on the same days.”

“In response to Russian actions so far, the EU has cancelled the next EU-Russia summit and member states' regular bilateral summits with Russia have also been annulled. Negotiations on visa matters and a new agreement with Russia have been suspended. The EU has also targeted 61 persons responsible for actions that threaten or undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine with asset freezes and bans from entering the EU. Two confiscated entities in Crimea and Sevastopol are also subject to an asset freeze.

“At the same time the EU continues to roll out a €11 billion support package to Ukraine including a €1.6 billion of Macro-financial assistance to contribute to covering Ukraine's urgent balance-of-payments needs (of which the first €100 million were paid out on 20 May) and a €365m state-building contract to help the country's transition and boost the role of civil society, promoting democratic reforms and inclusive socio-economic development.”

3. Petikan pernyataan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dalam konferensi pers bersama penutupan pertemuan rutin G7 di Brussel Belgia tanggal 5 Juni 2014 (*The White House: Office of the Press Secretary, 2014*):

“Originally, of course, our summit was supposed to be in Sochi. But after Russia's actions in Ukraine, our nations united quickly around a common strategy. We suspended Russia from the G8 and we cancelled the Sochi meeting, making this the first G7 held without Russia in some 20 years. All seven of our nations have taken steps to impose costs on Russia for its behavior. Today, in contrast to a growing global economy, a sluggish Russian economy is even weaker because of the choices made by the Russia's leadership. Meanwhile, our nations continue to stand united in our support and assistance to the Ukrainian people. And the G7 Summit was an occasion for me, David and our fellow leaders to ensure that we're in lockstep going forward.”

“On Ukraine, I shared the results of my meeting yesterday with President-elect Poroshenko. Like so many Ukrainians, he wants to forge closer ties with Europe and the United States, but also recognizes that Ukraine will benefit from a constructive relationship with Russia. So I believe his inauguration provides an opportunity, particularly since he has demonstrated a commitment to reach out to the east, and pursue reforms. Russia needs to seize that opportunity. Russia needs to recognize that President-elect Poroshenko is the legitimately elected leader of Ukraine and engage the government in Kyiv.”

4. Petikan pernyataan Perdana Menteri Inggris David Cameron dalam konferensi pers bersama penutupan pertemuan rutin G7 di Brussel Belgia tanggal 5 Juni 2014 (*The White House: Office of the Press Secretary*, 2014):

“And finally, as Barack said, we had an important discussion on Ukraine and relations with Russia. From the outset of this crisis, the G7 nations have stood united, clear in our support for the Ukrainian people and their right to choose their own future, and firm in our message to President Putin that Russia’s actions are completely unacceptable and totally at odds with the values of this group of democracies. That is why Russia no longer has a seat at the table here with us.”

Dari data pernyataan resmi di atas dapat disimpulkan sebagai pernyataan dan penegasan bahwa G7 adalah komunitas internasional yang memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi, keterbukaan, kebebasan, perdamaian dan keamanan, serta mendukung adanya kemakmuran bersama di seluruh dunia. Sehingga dalam setiap tindakan serta kebijakannya, G7 harus selalu mencerminkan nilai-nilai tersebut. Aneksasi Crimea oleh Rusia dinilai oleh G7 sebagai tindakan yang sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Rusia sebagai anggota dari G8.

Selain itu fakta tersebut juga merupakan bentuk pernyataan dan penegasan bahwa G7 adalah organisasi yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk mendorong adanya kestabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Maka G7 harus selalu memberikan kontribusi baik dalam bentuk tindakan maupun kebijakan yang dapat menunjang terwujudnya kestabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan adanya aneksasi Crimea oleh Rusia, G7 memandang bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak memberikan kontribusi sama sekali kepada usaha mewujudkan kestabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, karena dengan aneksasi tersebut justru membuat situasi konflik semakin buruk yang berujung pada ketidakstabilan ekonomi dunia serta perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Beberapa pernyataan juga menegaskan bahwa G7 mengutuk aksi aneksasi Crimea yang dilakukan oleh Rusia, karena aneksasi Crimea oleh Rusia adalah sebuah tindakan yang tidak mencerminkan prinsip demokrasi, keterbukaan, kebebasan, perdamaian dan keamanan, serta tidak mendukung adanya kemakmuran bersama di seluruh dunia. Terbukti sebagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip yang diusung oleh G7, serta prinsip-prinsip internasional lainnya seperti hukum internasional, dengan demikian G7 menganggap pantas untuk diberikan sanksi sebagai bentuk hukuman terhadap tindakan Rusia. Maka secara kolektif G7, dalam berbagai pernyataan di atas juga disebutkan bahwa G7 mengeluarkan kebijakan berupa pemboikotan pertemuan rutin G8 yang semula akan diadakan di Kota Sochi Rusia pada

tanggal 4 sampai 5 Juni 2014 sebagai bentuk protes dan penegasan sikap G7 yang sangat menentang aneksasi Crimea oleh Rusia.

Selain melakukan boikot terhadap pertemuan G8 di Kota Sochi, G7 juga mengeluarkan kebijakan berupa penundaan keanggotaan Rusia sebagai respon atas tindakan aneksasi Crimea. Kebijakan ini dikeluarkan untuk semakin mempertegas sikap dan pendirian dari G7 bahwa tindakan yang dilakukan oleh Rusia dengan melakukan aneksasi terhadap Crimea adalah tindakan pelanggaran yang berat dan sudah diluar ambang batas toleransi sebagai anggota G8 bahkan sebagai warga internasional. Sehingga tindakan tersebut perlu untuk diberikan sanksi yang sedemikian berat sampai pada taraf penundaan keanggotaan Rusia. Lebih lanjut G7 juga menyatakan dan menegaskan bahwa jika hingga batas waktu tertentu Rusia tidak menunjukkan adanya perubahan sikap atas tindakan aneksasi yang dilakukannya terhadap Crimea, maka tidak menutup kemungkinan untuk dijatuhkan sanksi lainnya yang lebih berat dengan harapan adanya perubahan sikap Rusia yang sangat bertentangan dengan prinsip yang dianut oleh G7.

Dengan kata lain, hipotesa yang menyatakan bahwa dikeluarkannya kebijakan penundaan keanggotaan Rusia oleh G7 sebagai respon terhadap aneksasi Crimea tahun 2014 adalah karena tidak mencerminkan penyelesaian masalah krisis yang terjadi di Ukraina serta tidak mendukung adanya kestabilan ekonomi dan kemakmuran bersama, seperti yang telah menjadi tujuan dari didirikannya G8 dapat dibuktikan melalui aksi boikot dari G7 terhadap pertemuan G8 di Sochi, Rusia, serta pernyataan resmi dari anggota G7 maupun pernyataan kolektif G7 sendiri.

Aneksasi Crimea dalam Perspektif Hukum Internasional

Menurut J.G. Starke, Q.C. (J.G. Starke, 1966), cara memperoleh kedaulatan dan status kenegaraan secara tradisi hubungan internasional dan hukum internasional adalah pendudukan, perwalian (*trust territory*), *act of self determination* (referendum), revolusi dan pemisahan diri. Dengan cara pendudukan berarti bahwa sebuah negara dapat secara sengaja dan legal melakukan pengakuan (*claim*) terhadap satu wilayah tertentu. Tindakan ini umumnya kita kenal dengan sebutan kolonialisme. Perwalian (*trust territory*) adalah pengakuan kedaulatan atas wilayah tertentu berdasarkan hasil dari resolusi Dewan Umum PBB.

Cara mendapatkan kedaulatan atas wilayah atau teritori lainnya adalah dengan cara *act of self-determination* atau bisa juga disebut dengan referendum. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan pemungutan suara dari sejumlah masyarakat yang berada di wilayah tertentu

untuk menentukan nasib masyarakat di wilayah itu sendiri. Sedangkan untuk revolusi dan pemisahan diri, meskipun tidak selalu berujung pada kemunculan negara baru, namun penggunaan cara ini masih dianggap sebagai salah satu pemicu munculnya negara baru.

Selain cara-cara di atas, masih terdapat satu cara lagi yang diakui oleh tradisi hubungan internasional dan hukum internasional, yaitu cessi. Cara ini berarti pengakuan (klaim) atas sebuah wilayah oleh sebuah entitas tertentu yang dilakukan dengan cara perjanjian atau transfer. Namun, cara ini tidak disarankan oleh hukum internasional, hingga paling tidak terdapat pernyataan dan bukti jelas bahwa sebuah entitas telah melakukan cessi dengan penguasa dan rakyat wilayah tertentu.

Court of Cassation menyebutkan dalam *Journal Sharia and Law mengenai Theories on Territorial Sovereignty* bahwa terdapat kemungkinan sebuah wilayah memindahtangankan kedaulatan penguasa (*interversio possessionis*) yang menguasainya dengan alasan timbal balik atau penghargaan atau upeti dan persewaan wilayah. Dalam sumber yang berbeda disebutkan, bahwa cessi adalah penguasaan sebuah wilayah oleh sebuah entitas melalui seperangkat perjanjian dan pembayaran atau sewa. Sementara aneksasi adalah pengakuan sepihak dari satu entitas terhadap satu wilayah, yang kemudian didukung oleh pengakuan umum baik dari dalam wilayah yang dianeksasi maupun dari entitas lainnya. Dalam kasus aneksasi, terdapat dua skenario yang akan terjadi, yakni terjadi secara paksa dan secara damai. Secara paksa maksudnya adalah dilakukan melalui serangkaian penaklukan, dan/atau pendudukan pasukan militer. Namun, tidak selamanya pendudukan atau penaklukan militer akan berujung pada aneksasi wilayah. Sedangkan secara damai dilakukan melalui perjanjian, atau melalui proklamasi (deklarasi) secara jelas (Distefano 2010, 34).

Aneksasi Crimea oleh Rusia dianggap oleh G7 sebagai tindakan yang tidak konstitusional, dan melanggar hukum internasional. Sebagai organisasi internasional yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan, G7 sangat menentang segala bentuk aksi negara anggotanya yang melawan prinsip-prinsip tersebut, terlebih lagi jika sampai melanggar hukum internasional. Berikut adalah beberapa hukum internasional yang dilanggar oleh Rusia dengan kebijakan aneksasi Crimea (Giuliani, 2015):

1. Dengan melakukan aneksasi terhadap Crimea, maka Rusia sudah melanggar Piagam PBB (*Charter of United Nations*) artikel 2 dan artikel 4 (Giuliani, 2015, p. 1)

“All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations”

2. Aneksasi Crimea melanggar *The Final Act of the Helsinki Conference (Organization for Security and Co-operation in Europe, 1975)*

“The participating States will respect each other's sovereign equality and individuality as well as all the rights inherent in and encompassed by its sovereignty, including in particular the right of every State to juridical equality, to territorial integrity and to freedom and political independence. They will also respect each other's right freely to choose and develop its political, social, economic and cultural systems as well as its right to determine its laws and regulations”

“The participating States will likewise refrain from making each other's territory the object of military occupation or other direct or indirect measures of force in contravention of international law, or the object of acquisition by means of such measures or the threat of them. No such occupation or acquisition will be recognized as legal”

3. Aneksasi Crimea melanggar *The Council of Europe (Parliamentary Assembly of Council of Europe, 2015)*

“On 26 January 2015, the still unratified credentials of the Russian delegation were challenged on the basis of Rules 8.1 and 8.2 of the Rules of Procedure of the Parliamentary Assembly on the grounds that the role and participation of the Russian Federation in the conflict in eastern Ukraine, as well as its continued illegal annexation of Crimea was in violation of the Statute of the Council of Europe (ETS No. 1) as well as its accession commitments to the Council of Europe, which, in general, brought into question the commitment of the Russian delegation to the principles and membership obligations of the Council of Europe.”

“The Assembly recalls its Resolution 1990 (2014) on the reconsideration on substantive grounds of the previously ratified credentials of the Russian delegation. In this resolution, the Assembly considered that the illegal annexation of Crimea by the Russian Federation, and the involvement and actions of the Russian Federation in the lead up to this annexation, constituted a grave violation of international law and were a clear contradiction to the Statute of the Council of Europe and Russia's accession commitments. The Assembly strongly condemned the violation of Ukrainian sovereignty and territorial integrity by the Russian Federation, which required a strong signal of disapproval from the Assembly. At the same time, the Assembly highlighted the need for continuing dialogue with the Russian Federation, including on Russia's obligations and adherence to the values and principles of the Council of Europe”

4. Aneksasi Crimea melanggar Konstitusi Ukraina dan Crimea

“The modification of the territory of Ukraine can only be decided by national referendum.”

“The territorial structure of Ukraine is based on the principles of unity and territorial unity, the combination of centralization and decentralisation in the exercise of the authority of the State, economic development and social balance of the regions, taking into account their specific historic, economic, ecological, geographical and demographic features, and ethnic and cultural traditions.”

Setelah memaparkan beberapa hukum serta perjanjian yang dilanggar Rusia dengan tindakan aneksasi Crimea, maka berikut adalah pemaparan beberapa bukti bahwa Rusia memang secara sengaja untuk melakukan tindakan tersebut, dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan Rusia telah melanggar hukum internasional. *Pertama*, bahwa pada tanggal 26 Februari 2014, Rusia melaksanakan latihan militer dalam skala besar di *Western Military District* (distrik militer barat) Rusia dan *Southern Military District* (distrik militer selatan) yang berbatasan langsung dengan Ukraina. Latihan militer tersebut melibatkan pasukan lintas angkatan, yang terdiri dari dua kelompok pasukan di distrik militer barat dan satu kelompok pasukan di distrik militer tengah. Selain itu, latihan ini juga melibatkan kurang lebih sebanyak 150.000 pasukan, ratusan tank, serta pesawat. Dilihat dari jumlah pasukan yang terlibat dalam latihan tersebut, ini merupakan skala latihan yang besar, dan dilakukan di perbatasan dekat dengan Ukraina dan Crimea yang dilakukan oleh Rusia (Nurberg, 2014).

Kedua, bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah mendapat mandate langsung dari *Russia's Federation Council* untuk melakukan intervensi terhadap Ukraina secara menyeluruh (Nurberg, 2014). Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa konflik Ukraina yang melanda pemerintahan Ukraina bagaimanapun akan memberikan efek kepada masyarakat Rusia yang berada di timur Ukraina dan Crimea sendiri. Maka, diperlukan tindakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan etnis Rusia di kedua wilayah tersebut. Lebih lanjut, Rusia memiliki markas militer, akses penting bagi jalur komunikasi di Crimea yang juga harus dilindungi dari berbagai macam kemungkinan ancaman yang muncul terutama masalah kerusuhan yang bisa saja terjadi mengingat adanya ketidakstabilan pemerintahan Ukraina dan terpecahnya masyarakat Ukraina dan Crimea menjadi dua yaitu, mendukung Ukraina dan Rusia. Hal lain yang mendorong adanya intervensi tersebut adalah fakta bahwa Crimea sangat tergantung terhadap suplai air, gas, dan listrik yang berasal dari Ukraina yang disalurkan melalui kereta dan jalan darat. Jika krisis Ukraina tidak berujung maka, keberadaan basis militer Rusia di Crimea turut terancam dengan pemutusan suplai tersebut (Nurberg, 2014).

Ketiga, adalah kehadiran dari pasukan bertopeng tanpa identitas yang disinyalir merupakan pasukan Rusia yang berasal dari divisi pasukan elit profesional Rusia di Crimea seperti pasukan elit pengintai dari divisi *Foreign Military Intelligence Directorate* (GRU), *Spetznaz special forces*, dan pasukan terjun payung. Pasukan tersebut tidak hanya berada di sembarang tempat, namun berada di beberapa titik strategis di Crimea seperti bandara,

pangkalan laut milik Ukraina, serta tempat-tempat strategis lainnya. Selain itu, beberapa kendaraan pasukan Rusia seperti truk-truk militer juga terlihat melakukan blokade di jalan-jalan strategis yang menghubungkan Ukraina dan Crimea (Nurberg, 2014).

Keempat, adalah mobilisasi pasukan cadangan Rusia. Mobilisasi ini seolah memberikan tanda bahwa Rusia memiliki misi militer yang penting, dan dalam jumlah besar. Sehingga kehadiran militer yang sekarang bahkan tidak cukup untuk memenuhi misi tersebut. Namun, hal ini belum dapat dikonfirmasi mengingat kerahasiaan informasi yang dijaga oleh Rusia (Nurberg, 2014). Satu hal yang membuatnya menjadi perhatian adalah pemanggilan pasukan cadangan ini dilakukan di tengah konflik Ukraina dan Crimea yang memanas.

Kelima, kehadiran dari rumah sakit dan logistik lapangan di dekat perbatasan Ukraina memberikan sinyal lainnya bahwa Rusia sedang mendukung pasukan yang sedang melaksanakan sebuah misi di daerah tersebut (Nurberg, 2014).

Keenam, pada tanggal 6 Maret 2014 dilaporkan adanya latihan penerjunan pasukan sebanyak 3.500 orang yang berasal dari distrik militer barat di Rusia Barat.

Ketujuh, pada tanggal 13 Mei 2014 Admiral Viktor Chirkov, Komandan Angkatan Laut Rusia menyatakan bahwa Rusia akan melakukan peningkatan jumlah di Crimea dalam waktu dekat. Selain itu Viktor Chirkov menambahkan bahwa Rusia juga akan menyandarkan dua kapal perangnya yakni Feodosia dan Donuzlav serta beberapa pesawat tempur marinir di Yevpatoria dan Belbek. Penambahan armada juga akan dilakukan untuk memperbarui kekuatan Angkatan Laut Rusia di Laut Hitam seperti penambahan 30 unit kapal perang, kapal selam, serta kapal pendukung dalam waktu enam tahun ke depan termasuk enam kapal *frigates* kelas Admiral Grigorovich, serta enam kapal selam *diesel-electric* kelas Varshavyanka (peningkatan dari kelas Kilo) (Keck, 2014). Peningkatan jumlah armada Rusia di Laut Hitam ini dilakukan dalam rangka peningkatan kesiapan angkatan perang Rusia di Laut Hitam seperti yang dikatakan oleh Chirkov

“The Black Sea Fleet must have a full complement of naval vessels to be capable of performing all assigned missions” (Keck, 2014).

Melihat apa yang dilakukan Rusia dengan pergerakan militernya di sekitar wilayah Barat Rusia dekat dengan perbatasan Ukraina serta di Crimea sudah cukup menunjukkan intervensinya terhadap konflik yang berlangsung.

Pertama, Rusia menunjukkan bahwa Crimea berada di bawah “perlindungan” militer Rusia yang seharusnya tidak dilakukan Rusia mengingat Crimea masih berada di bawah wewenang kedaulatan Ukraina.

Kedua, “perlindungan” yang diberikan Rusia kepada masyarakat Crimea tidak datang melalui persetujuan Ukraina sebagai pemegang sah kedaulatan Crimea, atau persetujuan negara sekitar, atau bahkan tidak atas persetujuan PBB. Sehingga kehadiran militer Rusia di Crimea, di luar militer Rusia yang ada di Sevastopol dan Simferopol yang memang basis militer Rusia di Crimea, merupakan sebuah pelanggaran hukum internasional.

Ketiga, kehadiran militer Rusia tersebut dilakukan tidak dengan identitas yang jelas dari pasukan yang berada di lapangan. Pakaian yang digunakan oleh pasukan tidak ada satu identitas pun yang menunjukkan asal pasukan tersebut sebagaimana seharusnya standar seragam militer digunakan. Militer tersebut secara tiba-tiba hadir di sebagian besar wilayah Crimea, dalam jumlah besar, serta menyatu kepada masyarakat Crimea yang menyuarakan dukungannya terhadap bersatunya Crimea dengan Rusia.

Keempat, pasukan Rusia juga melakukan blokade jalan-jalan strategis yang mengarah dari dan ke Ukraina dengan alasan memutus akses Ukraina-Crimea agar Crimea tidak terkena dampak kekacauan yang terjadi di Ukraina.

Kelima, referendum yang dilakukan Crimea berada di bawah pengawasan militer Rusia yang tersebar di berbagai tempat di Crimea. Hal ini membuat pelanggaran Rusia semakin jelas. Referendum dilaksanakan secara mendadak, tidak atas persetujuan parlemen Ukraina, serta di bawah pengawasan satu pihak yakni militer Rusia.

Beberapa data yang dipaparkan memang tidak begitu jelas dan rinci karena semasa konflik ini terjadi Rusia sangat menutup akses informasi terkait pergerakan militer serta politiknya kepada Ukraina dan Crimea kepada publik. Bahkan media resmi Rusia sendiri sangat sedikit memberikan kabar mengenai konflik yang terjadi di Ukraina dan Crimea. Data tersebut diperoleh melalui beberapa artikel media yang berhasil menghimpun informasi dari beberapa masyarakat yang ada di Ukraina dan Crimea, serta hasil dari pengamatan jurnalis yang berhasil masuk ke kedua wilayah tersebut.

Dengan berbagai tindakan tersebut, telah jelas bahwa Rusia tidak menghormati kedaulatan dan wilayah Ukraina sebagai negara berdaulat, telah mencampuri urusan dalam negeri Ukraina, telah melakukan klaim sepihak atas wilayah Crimea. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesa yang menyatakan bahwa dikeluarkannya kebijakan penundaan keanggotaan Rusia oleh G7 sebagai respon terhadap aneksasi Crimea tahun 2014 adalah karena telah melanggar hukum internasional yang mengatur tentang kedaulatan dan teritori

negara Ukraina dapat dibuktikan melalui penggalan pernyataan hukum internasional yang telah disebutkan di atas.

Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya, penelitian ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara dikeluarkannya kebijakan penundaan keanggotaan Rusia oleh G7 sebagai respon atas aneksasi Crimea tahun 2014 dengan peran dan status G8 sebagai organisasi yang memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi, keterbukaan, kebebasan, perdamaian dan keamanan, serta bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran bersama dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dimana G7 menganggap bahwa kebijakan aneksasi Crimea oleh Rusia bukanlah kebijakan yang strategis untuk menyelesaikan krisis Ukraina melainkan negosiasi serta pertemuan antar pihak adalah cara-cara yang diharapkan dijalankan oleh semua pihak yang ingin membantu penyelesaian krisis Ukraina.

Selain itu penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara dikeluarkannya kebijakan penundaan keanggotaan Rusia oleh G7 sebagai respon atas aneksasi Crimea tahun 2014 dengan hukum internasional, yaitu berupa pelanggaran terhadap hukum internasional diantaranya adalah Piagam PBB, *Final Act of Helsinki Conference, Council of Europe*, dan Konstitusi Ukraina dan Crimea. Dibuktikan dengan adanya fakta-fakta yang mendukung hal tersebut, seperti kehadiran militer Rusia di perbatasan Ukraina, serta peningkatan jumlah militer di Crimea.

Pelanggaran inilah yang menjadi dasar bagi berbagai pihak, baik negara maupun institusi internasional termasuk G7 mengeluarkan berbagai macam sanksi. Beberapa sanksi yang dikeluarkan oleh G7 adalah dengan melakukan boikot pertemuan G8 yang seharusnya diadakan di Kota Sochi Rusia, dan penundaan keanggotaan Rusia.

Referensi

Buku

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2016). Retrieved May 15, 2016, from kbbi.web.id:

<http://kbbi.web.id/peran>

Mas'ood, M. (1989). *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorasi*. Yogyakarta: LP3ES.

Ness, G. D., & Brechin, S. R. (1987). BRIDGING THE GAP: International Organization as Organizations. In G. D. Ness, & S. R. Brechin, *BRIDGING THE GAP: International Organization as*

Organizations. Michigan: Center for Research on Social Organizations, University of Michigan.

Dokumen Resmi

European Commission. (2014, June 3). *G7 Summit in Brussels, 4 – 5 June 2014: Background note and facts about the EU's role and actions*. Retrieved March 28, 2016, from European Commission: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-392_en.htm

Government of Canada. (2014, Juni 5). *G7 Declarations*. Retrieved Maret 28, 2016, from Global Affairs Canada: <http://www.international.gc.ca/g8/g8-declarations-declarations.aspx?lang=eng>

Group of Seven (G7). (2014, March 24). *THE HAGUE DECLARATION following the G7 meeting on 24 March*. Retrieved March 20, 2016, from European Commission: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-82_en.htm

Organization for Security and Co-operation in Europe. (1975, August 1). *Ministerial Council*. Retrieved March 28, 2016, from Organization for Security and Co-operation in Europe: <http://www.osce.org/mc/39501?download=true>

Parliamentary Assembly of Council of Europe. (2015). *Challenge, on substantive grounds, of the still unratified credentials of the delegation of the Russian Federation*. Retrieved March 28, 2016, from <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=21538&lang=en>

The White House: Office of the Press Secretary. (2014, June 5). *Remarks by President Obama and Prime Minister David Cameron of the United Kingdom in Joint Press Conference*. Retrieved March 20, 2016, from The White House: <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/06/05/remarks-president-obama-and-prime-minister-david-cameron-united-kingdom->

Jurnal dan Artikel

Bard, M. G. (2012). Myths and Facts: A Guide to Arab-Israeli Conflict. *American Israeli Cooperative Enterprise (AICE) Inc.*

BBC Monitoring. (2015, March 13). *Crimea profile - Overview*. Retrieved March 28, 2015, from <http://www.bbc.com/news/world-europe-18287223>

BeeHive Digital Concept Cochin for Mahatma Gandhi University Kottayam. (n.d.). Chapter V: The Role Theory.

Beinin, J., & Hajjar, L. (2014). Palestine, Israel and the Arab-Israeli Conflict. *The Middle East Research & Information Project*.

- Center for International Development and Conflict Management. (2010, July 16). *Chronology for Crimean Russians in Ukraine*. Retrieved March 28, 2016, from <http://www.cidcm.umd.edu/mar/chronology.asp?groupId=36905>
- Distefano, P. G. (2010). Theories on Territorial Sovereignty: A Reappraisal. *Journal of Sharia and Law*, 25-47.
- Dreyer, I., & Popescu, N. (2014). Do sanctions against Russia work? *European Union Institute for Security Studies*.
- Ellis, D. C. (n.d.). The Organizational Turn in International Organization Theory. *U.S. Department of Defense*.
- Family Health International. (n.d.). *Qualitative Research Methods: A Data Collector's Field Guide*.
- G8 Research Group. (2006). Russia and G8: An Overview of Russia's Integration into G8. *G8 Research Group*, 6-21.
- G8 Research Group University of Toronto. (2014, September 26). *What is G8*. Retrieved April 20, 2015, from G8 Information Centre: http://www.g8.utoronto.ca/what_is_g8.html
- Garber, P. M. (1993). The Collapse of the Bretton Woods Fixed Exchange Rate System. *National Bureau of Economic Research*.
- Giuliani, J.-D. (2015). Russia, Ukraine and International Law. *Foundation Robert Schuman*.
- Haftel, Y. Z., & Thompson, A. (2006). The Independence of International Organizations: Concept and Applications. *The Journal of Conflict Resolution*.
- Hamilton, J. D. (2010). Historical Oil Shocks.
- Harari, B. S. (2014, March 17). *Ukraine, Crimea and Russia*. Retrieved April 20, 2015, from House of Commons Library: <http://www.parliament.uk/briefing-papers/rp14-16.pdf>
- Hazakis, K. J. (-). The Role of G8 Economic Summits in Global Monetary Architecture. *CEJISS*, 167-186.
- J.G. Starke, Q. (1966). The Acquisition of Territorial Sovereignty by Newly Emerged States. *Australian International Law*.
- Keck, Z. (2014, May 15). *Russia's Expand Naval Presence in Crimea*. Retrieved April 30, 2016, from The Diplomat: <http://thediplomat.com/2014/05/russia-expands-naval-presence-in-crimea/>
- Meierhenrich, J. (2012). *International Organisations*. London: University of London.
- Nelson, R. M. (2015). *U.S. Sanctions on Russia: Economic Implications*. -: Congressional Research Service.
- Nurberg, J. (2014, March 13). *The Use of Russia's Military in the Crimean Crisis*. Retrieved April 30, 2016, from Carnegie of Endowment for International Peace: <http://carnegieendowment.org/2014/03/13/use-of-russia-s-military-in-crimean-crisis>

Oxenstierna, S., & Olsson, P. (2015). The economic sanctions against Russia. Impact and prospects of Success. *FOI, Swedish Defence Research Agency*.

Robert Drislane, P., & Gary Parkinson, P. (n.d.). *Qualitative Research*. Retrieved June 20, 2015, from Online Dictionary of the Social Sciences:
<http://bitbucket.icaap.org/dict.pl?term=QUALITATIVE%20RESEARCH>

Shearmarch, A. S. (2014, Maret 25). *Russia is Ousted from Group of 8 by U.S. and Allies*. Retrieved April 20, 2015, from New York Times:
http://www.nytimes.com/2014/03/25/world/europe/obama-russia-crimea.html?_r=0

Swain, J. (2014, March 2). *Russia G8 Status at Risk Over 'Incredible Act of Agression' in Crimea, Says Kerry*. Retrieved April 20, 2015, from The Guardian:
<http://www.theguardian.com/world/2014/mar/02/john-kerry-russia-putin-crimea-ukraine>

Thies, C. G. (2009). Role Theory and Foreign Policy. 2-35.

Official Website

Lukov, V. (2006). Russia's G8 History: From Guest to President. *Russia in Global Affairs*, 8-21.

Official Website of Russia's G8 Presidency. (-, - -). *About the Group of Eight*. Retrieved April 20, 2015, from Official Website of Russia's G8 Presidency:
http://en.g8russia.ru/docs/russia_and_g8/about_g8.html

Official Website of Russia's G8 Presidency. (-, - -). *G8 and Russia: History of Relation*. Retrieved April 20, 2015, from Official Website of Russia's G8 Presidency:
http://en.g8russia.ru/docs/russia_and_g8/history.html

Official Website of Russia's G8 Presidency. (2014, March 26). *Sergey Lavrov: No one can expel members from the G8*. Retrieved March 20, 2016, from
<http://en.g8russia.ru/news/20140326/983286847.html>